

Perancangan *Site Plan* dan Pendampingan Digital BUMDes di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk Akselerasi Desa Wisata 2026

Ahmada Rana Rafidhah ^{1*}, Muhammad Ivan Surya Akbar ², Weka Nurkharisma ³, Amanda Puspita ⁴, Sifaul Ummah ⁵, Tahta Dhilli Arsika ⁶, Muhammad Faqih Mutafannin ⁷, Nurul Khoirotin ⁸, Diah Handayani ⁹

¹ Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

² Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

³ Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

⁴ Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

⁵ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

⁶ Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

⁷ Program Studi Tadris Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

^{8,9} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Email: ahmarana03@gmail.com ^{1*}, ivanakbar67@gmail.com ², wekkank@gmail.com ³, puspitaamanda04@gmail.com ⁴, sifaulumma05@gmail.com ⁵, arsikatahta2803@gmail.com ⁶, mutafanninfaqih@gmail.com ⁷, nurulkhoirotin207@gmail.com ⁸, diahhandayani.kpi@iainkediri.ac.id ⁹

Histori Artikel:

Dikirim 10 Januari 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 24 Januari 2026; *Diterima* 20 Februari 2026; *Diterbitkan* 10 Mei 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Pengembangan desa wisata berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi strategi kunci dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya promosi digital, dan belum adanya perencanaan tata ruang BUMDes yang sistematis. Pengabdian masyarakat bertujuan menyusun site plan BUMDes sebagai acuan pengembangan fisik kawasan wisata dan memperkuat kapasitas digitalisasi promosi. Pendekatan kualitatif partisipatif digunakan melalui kerangka Asset Based Community Development (ABCD) untuk pemetaan potensi desa, dilengkapi analisis SWOT dalam merumuskan strategi pengembangan. Pelaksanaan berlangsung pada Juli–Agustus 2025 dengan melibatkan 10 informan kunci melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan member check. Kegiatan menghasilkan site plan konseptual BUMDes yang terdiri dari 11 bagian utama berfungsi ekonomi, sosial, edukatif, dan rekreatif. Selain itu, dibentuk akun media sosial resmi BUMDes sebagai kanal promosi digital. Evaluasi menunjukkan partisipasi masyarakat mencapai 92% dan peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pengabdian tidak sekadar menghasilkan rencana dan pendampingan awal, melainkan juga meletakkan fondasi kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia bagi keberlanjutan pengelolaan BUMDes. Site plan dan penguatan digitalisasi yang dihasilkan berfungsi sebagai instrumen awal yang mendukung percepatan Desa Klampitan menuju desa wisata tahun 2026.

Kata Kunci: BUMDes; Siteplan; Digitalisasi; Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Tourism village development through Village-Owned Enterprises (BUMDes) serves as a key strategy for rural economic empowerment. Klampitan Village, Purwoasri District, Kediri Regency, encounters several obstacles including limited human resource capacity, weak digital promotion, and lack of systematic spatial planning for BUMDes development. The community service program aimed to design a BUMDes site plan as a guideline for physical tourism area development and to enhance digital promotion capacity. A qualitative participatory approach was employed through the Asset-Based Community Development (ABCD) framework for village asset mapping, complemented by SWOT analysis for strategy formulation. Implementation took place from July to August 2025, involving 10 key informants through observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGDs). Data validation was conducted using source triangulation and member checking. The program produced a conceptual BUMDes site plan comprising 11 main sections with economic, social, educational, and recreational functions. Additionally, official BUMDes social media accounts were established as digital promotion channels. Evaluation showed 92% community participation and improved capabilities of MSME actors in utilizing social media for product marketing. These achievements demonstrate that the program not only generated initial plans and facilitation but also established institutional foundations and human resource capacity for sustainable BUMDes management. The resulting site plan and digital enhancement function as initial instruments supporting the acceleration of Klampitan Village toward becoming a tourism village in 2026.

Keyword: BUMDes; Site Plan; Digitalization; Tourism Village; Community Empowerment.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan, sehingga keberhasilan pembangunan desa berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional (Sa'dullah, 2016). Desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.

Salah satu instrumen kunci dalam pembangunan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi berbasis potensi lokal. BUMDes memiliki peran strategis dalam pengembangan desa wisata, mengingat sektor pariwisata terbukti mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal merupakan modal pembangunan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan desa wisata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan diferensiasi destinasi wisata antar desa, di mana setiap desa dituntut memiliki produk unggulan yang khas dan bernilai jual. Produk unggulan tersebut selanjutnya diarahkan sebagai sumber penghidupan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi lokal yang terintegrasi. Namun demikian, tidak semua desa memiliki potensi alam atau cagar budaya yang secara alami dapat dijadikan daya tarik wisata, sehingga diperlukan inovasi berbasis aset yang dimiliki desa.

Keterbatasan potensi wisata alam menjadi karakteristik utama Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang sejak awal pengembangannya tidak bertumpu pada daya tarik alam maupun situs budaya unggulan. Desa Klampitan tidak memiliki potensi wisata alam yang dominan, sehingga penentuan arah pengembangan desa wisata menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah desa dan masyarakat kemudian menggagas pemanfaatan lahan kosong yang berada di wilayah desa untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan BUMDes sekaligus embrio kawasan wisata desa dengan target pengembangan menuju desa wisata pada tahun 2026. Inisiatif tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mengoptimalkan aset desa yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun, dalam praktiknya, pengembangan BUMDes dan desa wisata di Desa Klampitan masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, belum terstrukturkannya perencanaan fisik kawasan, serta minimnya

promosi berbasis digital. Permasalahan promosi semakin relevan dalam era pasca-pandemi, ketika pola promosi dan pemasaran wisata desa semakin bergeser ke platform digital. Kondisi demikian menyebabkan potensi ekonomi desa belum dapat dioptimalkan secara menyeluruh, sementara keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masih terbatas. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan, maupun penyediaan layanan dan produk wisata.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan wisata pedesaan kerap terkendala oleh rendahnya kapasitas pelaku lokal. Sharpley (2002) menjelaskan bahwa peralihan masyarakat pedesaan dari sektor pertanian ke sektor pariwisata sering tidak diimbangi dengan kesiapan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Salvatore, Chiodo, dan Fantini (2018) juga menegaskan bahwa keterbatasan pengalaman, kepercayaan diri, serta kapasitas pengelolaan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan wisata desa memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penguatan aset dan kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) menjadi relevan karena menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang telah dimiliki masyarakat sebagai dasar pembangunan. Namun, hingga saat ini masih jarang ditemukan kajian pengabdian yang mengintegrasikan pemetaan aset desa berbasis ABCD dengan perancangan *site plan* fisik kawasan BUMDes serta pendampingan strategi digital secara terstruktur, khususnya pada desa yang tidak memiliki daya tarik wisata alam bawaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri di Desa Klampitan difokuskan pada perancangan *site plan* BUMDes dan pendampingan digital sebagai upaya akselerasi pengembangan desa wisata. Kegiatan diposisikan sebagai fasilitasi dan perancangan awal yang mendukung agenda pembangunan desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa menuju Desa Klampitan sebagai desa wisata tahun 2026.

2. Metode

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Desa Klampitan memiliki inisiatif pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diarahkan menuju desa wisata tahun 2026 serta memperoleh dukungan penuh dari pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 45 hari, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus 2025, bertepatan dengan masa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2.2 Desain Kegiatan Pengabdian

Desain kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif, dengan penekanan pada pendampingan masyarakat desa melalui metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang dipadukan dengan analisis SWOT. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memetakan potensi lokal berbasis aset yang telah dimiliki masyarakat serta merumuskan strategi pengembangan BUMDes yang kontekstual dan berkelanjutan.

2.3 Informan dan Teknik Sampling

Penentuan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria:

- 1) Individu yang memiliki peran aktif dalam pengelolaan desa atau BUMDes;
- 2) Tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial-ekonomi Desa Klampitan; dan
- 3) Pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan pengembangan desa wisata.

Sebanyak 10 informan terlibat dalam proses pemetaan aset menggunakan metode ABCD, yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Dusun, Direktur BUMDes, Ketua Kelompok Tani, serta perwakilan Karang Taruna. Sementara itu, 2 informan kunci (Kepala Desa dan Direktur BUMDes) dilibatkan secara khusus dalam penyusunan faktor strategis analisis SWOT. Pemilihan informan kunci ini didasarkan pada kewenangan dan pengetahuan mereka dalam pengambilan keputusan strategis BUMDes, dengan hasil analisis tetap dikonfirmasi melalui diskusi kelompok untuk meminimalkan potensi bias. Proses ini dilengkapi dengan forum klarifikasi bersama pemangku kepentingan desa untuk menilai kesesuaian dan kelayakan faktor strategis yang telah dirumuskan.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali potensi aset desa dan merumuskan visi pengembangan BUMDes;
- 2) Wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci guna memperoleh informasi mendalam terkait kebijakan, kendala, dan arah pengembangan BUMDes;
- 3) Observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi fisik lokasi rencana BUMDes dan aktivitas masyarakat.

Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, meliputi data luas wilayah, jumlah penduduk, serta dokumen perencanaan desa yang relevan.

2.5 Prosedur Pelaksanaan Metode ABCD

Pelaksanaan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) mengacu pada lima tahapan utama (Dureau, 2013), yaitu:

- 1) *Define*, yaitu penentuan fokus kegiatan pengabdian, dalam hal ini pengembangan BUMDes menuju desa wisata;
- 2) *Discovery*, yakni penggalan aset desa melalui FGD dan wawancara untuk mengidentifikasi potensi sumber daya manusia, sosial, dan fisik desa;
- 3) *Dream*, yaitu perumusan harapan dan visi bersama masyarakat terkait pengembangan BUMDes dan desa wisata tahun 2026;
- 4) *Design*, berupa penyusunan rancangan *site plan* BUMDes serta konsep pendampingan digital sebagai bentuk konkret pemanfaatan aset desa;
- 5) *Destiny*, yaitu tahap implementasi awal berupa pendampingan, pelatihan promosi digital, serta penyerahan rancangan program kepada pengelola BUMDes untuk keberlanjutan pasca-KKN.

Seluruh tahapan pengabdian ini dilaksanakan dalam keterbatasan waktu KKN selama 45 hari, sehingga kegiatan difokuskan pada perancangan awal dan pendampingan dasar, sementara keberlanjutan program menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

2.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengkodean tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil pemetaan aset dari metode ABCD digunakan sebagai faktor eksternal dalam analisis SWOT, sedangkan faktor internal diperoleh dari wawancara dengan pengelola BUMDes. Penyusunan matriks SWOT dilakukan melalui diskusi terarah bersama informan kunci dan divalidasi melalui forum *Focus Group Discussion* dengan pemangku kepentingan desa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Validasi hasil SWOT dilakukan dengan membandingkan hasil diskusi informan kunci dengan masukan dari peserta FGD untuk memastikan kesesuaian antara strategi yang dirumuskan dan kondisi riil desa.

2.7 Validitas Data dan Etika Penelitian

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil (*member check*) kepada informan utama. Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat sebesar 92% dihitung

berdasarkan rasio kehadiran dan keterlibatan aktif peserta dalam FGD, pelatihan, serta kegiatan pendampingan utama selama periode pengabdian. Seluruh informan dilibatkan secara sukarela dengan persetujuan lisan, serta identitas pribadi dijaga kerahasiaannya untuk memenuhi prinsip etika pengabdian kepada masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Pelaksanaan Program dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada perancangan *site plan* BUMDes dan pendampingan digital di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, berjalan sesuai dengan tahapan yang telah dirancang. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama perangkat desa, pengelola BUMDes, pedagang kaki lima, serta perwakilan masyarakat untuk memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan desa. Hasil koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pentingnya penataan kawasan BUMDes sebagai bagian dari agenda pengembangan Desa Klampitan menuju desa wisata tahun 2026. Berdasarkan daftar kehadiran dan catatan partisipasi selama kegiatan, tingkat keterlibatan masyarakat dan perangkat desa mencapai 92%, yang dihitung dari perbandingan antara jumlah peserta yang hadir dengan jumlah undangan pada setiap tahapan kegiatan pengabdian. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan adanya penerimaan dan antusiasme masyarakat terhadap program pendampingan yang dilaksanakan.

3.1.2 Penataan Pedagang dan Penyusunan *Site Plan* BUMDes

Salah satu hasil awal dari kegiatan pengabdian adalah penataan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sekitar lapangan Desa Klampitan. Melalui proses sosialisasi dan diskusi, sebagian pedagang bersedia menempati lokasi BUMDes baru yang berada di Dusun Klampitan, tepatnya di area sebelah pom mini. Lokasi memiliki luas sekitar ± 60 m² dan saat kegiatan berlangsung telah terisi empat kios aktif, yaitu Mie Ayam & Es Dawet "Pak No", Toko Mafia "S", Sempol, dan Es Teh Jumbo. Proses pemindahan pedagang tidak berlangsung tanpa tantangan. Beberapa pedagang menyampaikan keraguan akibat minimnya informasi awal mengenai rencana penataan. Salah satu pedagang menyampaikan bahwa "awalnya ragu pindah karena takut sepi pembeli, tapi setelah dijelaskan konsepnya kami mau mencoba". Pedagang lain juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keberlanjutan pengunjung dengan menyatakan bahwa "yang penting nanti benar-benar ada ramai, jangan cuma dipindah tapi sepi". Temuan menunjukkan adanya resistensi awal yang kemudian dapat diminimalkan melalui pendekatan partisipatif dan komunikasi langsung. Hasil observasi lapangan dan diskusi tersebut menjadi dasar penyusunan *site plan* BUMDes Desa Klampitan, yang dirancang sebagai panduan tata ruang pengembangan kawasan. *Site plan* terdiri atas 11 elemen utama, yaitu: (1) pom mini, (2) papan nama BUMDes, (3) kolam ikan, (4) kios BUMDes, (5) plang edukasi sampah, (6) kolam terapi ikan, (7) gazebo, (8) kolam renang anak, (9) toilet, (10) taman bunga, dan (11) plang arah lokasi. Rancangan *site plan* disusun dengan mempertimbangkan fungsi ruang, alur sirkulasi pengunjung, serta potensi pengembangan bertahap sesuai kapasitas desa. *Site plan* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai alat komunikasi visual yang membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam memahami arah pengembangan kawasan BUMDes. Tata ruang yang dirancang mengintegrasikan fungsi rekreatif, edukatif, dan ekonomi, sehingga mendukung konsep desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

3.1.3 Pendampingan Digitalisasi BUMDes

Seiring dengan penyusunan *site plan*, tim pengabdian juga melaksanakan pendampingan digitalisasi BUMDes sebagai strategi promosi awal. Pendampingan diwujudkan melalui pembentukan dan pengelolaan akun media sosial resmi BUMDes Desa Klampitan, yaitu:

- 1) Instagram: @bumdes.klampitan
- 2) TikTok: @bumdes.klampitan
- 3) Email: bumdesklampitan17@gmail.com

Akun media sosial tersebut difungsikan sebagai kanal informasi dan promosi yang menampilkan aktivitas BUMDes, produk UMKM, serta potensi kawasan wisata desa. Selama masa pendampingan, masyarakat dan pengelola BUMDes diperkenalkan pada praktik dasar pembuatan konten, pengunggahan informasi, dan pemanfaatan media digital untuk promosi. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa "sekarang sudah berani unggah dagangan sendiri, meskipun masih sederhana", yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri dalam pemanfaatan media digital.

3.1.4 Evaluasi dan Dampak Awal Program

Evaluasi kepuasan masyarakat dilakukan melalui kuesioner sederhana yang terdiri atas beberapa indikator penilaian terkait pelaksanaan kegiatan, kejelasan pendampingan, dan manfaat program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 87% responden memberikan penilaian kategori sangat baik, dengan skor rata-rata 4,6 dari skala 5. Hasil tersebut merefleksikan penerimaan positif masyarakat terhadap program pengabdian yang dilaksanakan, meskipun kegiatan masih berada pada tahap perancangan dan pendampingan awal. Secara kualitatif, hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dasar promosi digital pada pelaku UMKM, meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap inovasi penataan kawasan, serta munculnya optimisme terhadap pengembangan BUMDes sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Dari sisi ekonomi, penataan kios dan perencanaan fasilitas berbasis *site plan* memberikan dasar awal bagi peningkatan aktivitas usaha dan potensi pendapatan desa di masa mendatang.

3.1.5 Luaran Program

Luaran dari kegiatan pengabdian meliputi:

- 1) Dokumen *site plan* BUMDes Desa Klampitan sebagai panduan tata ruang dan pengembangan kawasan desa wisata.
- 2) Akun media sosial resmi BUMDes sebagai sarana promosi dan komunikasi digital.
- 3) Peningkatan kapasitas dasar masyarakat dan UMKM dalam pemanfaatan media digital melalui pendampingan langsung.
- 4) Dokumentasi kegiatan berupa foto, video, dan laporan digital sebagai bukti ketercapaian program.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa perancangan *site plan* dan pendampingan digital BUMDes mampu menjadi fondasi awal pengembangan Desa Klampitan menuju desa wisata tahun 2026. Meskipun dampak jangka panjang belum dapat diukur dalam keterbatasan waktu KKN, hasil yang dicapai memberikan pijakan strategis bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk melanjutkan program secara berkelanjutan.



(a) Pemasangan Banner BUMDes Bersama Warga Desa Klampitan



(b) Lokasi BUMDes Desa Klampitan baru di sebelah Pom Mini



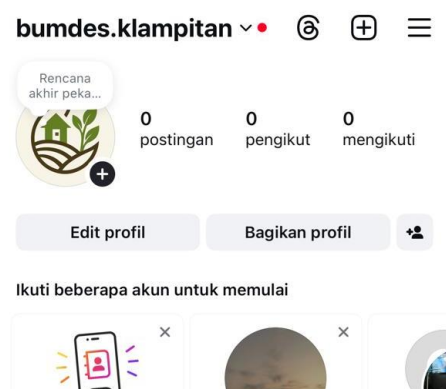
(c) Site Plan BUMDes Desa Klampitan



(d) Rembug bersama perangkat Desa Klampitan membahas mengenai Site Plan BUMDes



(e) Akun Sosial Media (TikTok) BUMDes Desa Klampitan



(f) Akun Sosial Media (Instagram) BUMDes Desa Klampitan

Gambar 1. Kegiatan Dokumentasi.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Klampitan menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes menuju desa wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya fisik, tetapi juga oleh pendekatan partisipatif yang mampu membangun rasa memiliki masyarakat terhadap program. Temuan sejalan dengan konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) yang menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan berangkat dari pengenalan dan penguatan aset lokal, bukan dari pendekatan berbasis masalah (Kretzmann & McKnight, 1993). Tingginya

tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan (92%) mengindikasikan bahwa proses perencanaan yang melibatkan berbagai elemen desa mampu memperkuat *sense of ownership*, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dalam pengembangan BUMDes. Penataan pedagang kaki lima ke area BUMDes baru dapat dipahami sebagai langkah awal konsolidasi ekonomi desa. Meskipun pada tahap awal muncul resistensi sebagian pedagang akibat kurang meratanya sosialisasi, dinamika tersebut justru menegaskan pentingnya komunikasi partisipatif dalam pembangunan desa wisata. Fenomena konsisten dengan temuan penelitian pengembangan wisata berbasis masyarakat yang menyebutkan bahwa resistensi awal merupakan hal yang wajar, terutama ketika perubahan menyangkut pola usaha dan lokasi ekonomi masyarakat. Pendekatan dialogis yang dilakukan selama pengabdian berkontribusi dalam menurunkan resistensi dan membuka ruang adaptasi bertahap bagi pelaku usaha lokal. Penyusunan *site plan* BUMDes Desa Klampitan merupakan salah satu capaian strategis yang memiliki implikasi jangka menengah hingga panjang. Dari perspektif perancangan ruang publik desa wisata, struktur *site plan* yang mengintegrasikan kios UMKM, fasilitas rekreasi anak, ruang terbuka hijau, dan elemen edukatif mencerminkan prinsip diversifikasi fungsi ruang dan aksesibilitas, yang menjadi prasyarat dalam pengembangan destinasi wisata skala desa. *Site plan* tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis pembangunan, tetapi juga sebagai alat konsensus bersama mengenai arah pemanfaatan ruang desa. Dengan demikian, *site plan* berperan sebagai instrumen pengendali agar pengembangan fisik tidak berjalan sporadis dan tetap selaras dengan visi desa wisata tahun 2026.

Selain aspek fisik, pendampingan digitalisasi BUMDes menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam pengembangan desa wisata modern. Pembentukan akun media sosial resmi BUMDes merupakan langkah awal dalam membangun visibilitas desa di ruang digital. Temuan sejalan dengan studi-studi tentang promosi desa wisata berbasis media sosial yang menekankan bahwa fase awal digitalisasi lebih berorientasi pada pembentukan identitas, konsistensi informasi, dan peningkatan literasi digital pengelola, sebelum masuk pada optimalisasi metrik keterlibatan (*engagement*). Dalam konteks Desa Klampitan, kemampuan pelaku UMKM untuk mulai mengunggah konten secara mandiri menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri dan kesiapan awal dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi.

Meskipun demikian, pembahasan hasil juga mengungkap sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian pada tahap keberlanjutan program. Pertama, keberlanjutan pengelolaan akun media sosial memerlukan tata kelola konten yang jelas, termasuk penentuan penanggung jawab, jadwal unggahan, dan standar informasi. Tanpa mekanisme tersebut, akun berpotensi menjadi tidak aktif setelah masa pendampingan berakhir. Kedua, terdapat risiko eksklusivitas bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital, sehingga pendampingan lanjutan perlu mengombinasikan promosi digital dengan strategi komunikasi luring. Ketiga, rencana penambahan fasilitas wisata berbasis *site plan* perlu diimbangi dengan pengelolaan dampak lingkungan, khususnya terkait penggunaan air dan pengelolaan limbah, agar pengembangan desa wisata tetap berkelanjutan.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian memberikan dasar bagi perumusan strategi pengembangan BUMDes. Meskipun dalam keterbatasan waktu KKN strategi tersebut belum diimplementasikan secara penuh, temuan SWOT dapat diturunkan ke dalam kerangka TOWS sebagai rekomendasi strategis. Strategi SO diarahkan pada pemanfaatan dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat pengembangan fasilitas berbasis *site plan*. Strategi WO menekankan penguatan kapasitas SDM dan promosi digital untuk mengatasi keterbatasan pengalaman pengelolaan wisata. Strategi ST difokuskan pada penguatan tata kelola BUMDes agar mampu beradaptasi dengan dinamika persaingan destinasi wisata, sementara strategi WT mengarah pada mitigasi risiko melalui perencanaan bertahap dan kolaborasi lintas sektor. Kerangka tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam menyusun prioritas program tahun 2025–2026. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi pengembangan BUMDes diturunkan ke dalam kerangka TOWS yang dirumuskan sebagai strategi prioritas tahun 2025–2026. Strategi disusun dalam bentuk indikator arah untuk menjaga kesesuaian

dengan keterbatasan waktu pengabdian dan berfungsi sebagai rujukan awal bagi pengelola BUMDes.

Tabel 1. Strategi Prioritas Pengembangan BUMDes Desa Klampitan 2025–2026

| Kategori Strategi | Fokus Strategi | Uraian Strategi Prioritas | Indikator Kinerja (Arah/Kualitatif) | Penanggung Jawab Utama |
|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|
| SO (<i>Strength-Opportunity</i>) | Optimalisasi potensi & dukungan | Pemanfaatan <i>site plan</i> sebagai panduan pengembangan bertahap kawasan BUMDes dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Tata ruang BUMDes digunakan sebagai acuan Bersama Keterlibatan masyarakat tetap terjaga | Pemerintah Desa & BUMDes |
| SO (<i>Strength-Opportunity</i>) | Penguatan promosi desa | Pemanfaatan media sosial resmi BUMDes untuk memperkenalkan potensi desa wisata dan produk UMKM | <ul style="list-style-type: none"> Akun media sosial aktif Konten promosi dipublikasikan secara berkala | BUMDes & Tim Pengelola |
| WO (<i>Weakness-Opportunity</i>) | Peningkatan kapasitas SDM | Pendampingan lanjutan bagi pengelola BUMDes dan UMKM terkait pengelolaan wisata dan promosi digital | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepercayaan diri pelaku UMKM Masyarakat mulai terlibat dalam promosi | BUMDes & Pemerintah Desa |
| WO (<i>Weakness-Opportunity</i>) | Penataan kelembagaan | Penyusunan pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan BUMDes dan akun digital | <ul style="list-style-type: none"> Tugas pengelola lebih jelas Koordinasi internal lebih terstruktur | BUMDes |
| ST (<i>Strength-Threat</i>) | Ketahanan pengelolaan | Penguatan tata kelola BUMDes agar mampu beradaptasi terhadap dinamika persaingan destinasi wisata desa | <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan usaha lebih tertib Keputusan berbasis musyawarah | BUMDes & Pemerintah Desa |
| WT (<i>Weakness-Threat</i>) | Mitigasi risiko & keberlanjutan | Pengembangan BUMDes secara bertahap sesuai kapasitas desa dan memperhatikan dampak lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas tidak bersifat sporadis Kesadaran lingkungan masyarakat meningkat | Pemerintah Desa & BUMDes |

Pengembangan BUMDes Desa Klampitan melalui perancangan *site plan* dan pendampingan digital merupakan strategi terintegrasi yang saling melengkapi. *Site plan* memberikan arah dan kepastian pengembangan fisik kawasan, sementara digitalisasi memperluas jangkauan promosi dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Dalam keterbatasan waktu pengabdian, program berhasil meletakkan fondasi awal yang penting bagi pengembangan desa wisata. Keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan oleh pemerintah desa dan BUMDes, serta kemampuan masyarakat untuk terus mengembangkan aset yang telah diidentifikasi selama proses pendampingan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Klampitan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis potensi lokal mampu mendukung penguatan tata kelola BUMDes dalam kerangka pengembangan desa wisata. Penyusunan *site plan* BUMDes memberikan arah perencanaan fisik dan tata ruang yang lebih terstruktur sebagai rujukan awal pengembangan kawasan usaha desa, sementara penguatan digitalisasi melalui media sosial resmi BUMDes berperan sebagai sarana promosi dan komunikasi publik yang memperluas eksposur potensi desa serta meningkatkan kapasitas dasar masyarakat dalam pemasaran digital. Pelibatan perangkat desa, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, dan unsur masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan berkontribusi pada terbentuknya rasa memiliki dan tingkat partisipasi yang tinggi. Temuan sejalan dengan prinsip *Asset Based Community Development* (ABCD) yang menekankan pemanfaatan aset internal desa sebagai fondasi pembangunan. Selain itu, integrasi perencanaan fisik dan digital menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang adaptif. Namun demikian, kegiatan memiliki keterbatasan, antara lain dilaksanakan dalam periode waktu yang relatif singkat, berfokus pada satu wilayah desa, serta belum didukung oleh data pembandingan kuantitatif terkait perubahan pendapatan atau evaluasi jangka panjang dampak ekonomi. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh lebih merepresentasikan capaian awal dan proses penguatan kapasitas, bukan dampak ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, direkomendasikan beberapa langkah lanjutan, antara lain: (1) implementasi bertahap pengembangan fasilitas prioritas BUMDes sesuai *site plan* pada tahun 2026, seperti kolam terapi ikan dan penguatan kios UMKM; (2) penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kios dan akun media sosial untuk menjamin keberlanjutan tata kelola; serta (3) peningkatan konsistensi produksi konten promosi digital melalui penjadwalan unggahan secara berkala sebagai bagian dari strategi promosi desa wisata. Dari ketiga rekomendasi tersebut, penyusunan SOP pengelolaan BUMDes dan media digital dipandang sebagai prioritas utama karena menjadi prasyarat bagi keberlanjutan pengelolaan fisik maupun promosi digital setelah berakhirnya kegiatan KKN. Integrasi program BUMDes dengan agenda pembangunan desa dan dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting untuk memperluas skala dan keberlanjutan program. Hasil Kegiatan pengabdian diketahui bahwa pengembangan BUMDes melalui kombinasi perencanaan tata ruang dan digitalisasi promosi merupakan strategi awal yang relevan dan kontekstual bagi Desa Klampitan. Dengan penguatan kelembagaan, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi jangka panjang, BUMDes berpotensi menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi desa dan mendukung realisasi visi Desa Klampitan sebagai desa wisata secara bertahap dan berkelanjutan. Penegasan prioritas tindak lanjut tersebut memberikan arah yang lebih jelas bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam melanjutkan program pasca-pengabdian.

5. Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>
- Andari, A. L. P., Anggraini, N., & Wulandari, A. W. (2025). Urgensi pendirian BUMDes untuk mendorong peningkatan UMKM dan perekonomian Desa Sepulu Bangkalan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 151–158. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1.1217>
- Dharmayanti, I., Suryadi, A., & Wibowo, A. (2019). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi sumber daya desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 89–98.

- Hastutik, D., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46–58. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>
- Izmi, D. S., & Prathama, A. (2023). Pengembangan desa wisata berbasis Bumdes. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 329-336.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.
- Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2017). *Marketing for hospitality and tourism* (7th ed.). Pearson Education.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Lane, B. (1994). What is rural tourism? *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 7–21. <https://doi.org/10.1080/09669589409510680>
- Maulana, A. (2019). Penguatan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 11(2), 101–109.
- Putri, J. C., & Ahmad. (2024). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata di Wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(2). <https://doi.org/10.35450/jip.v12i02.553>
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangun perekonomian desa. *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sa'dullah. (2016, Juni 28). *Pentingnya media audio visual dalam pengembangan kawasan perdesaan agropolitan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan>
- Salvatore, R., Chiodo, E., & Fantini, A. (2018). Tourism transition in peripheral rural areas: Theories, issues and strategies. *Annals of Tourism Research*, 68, 41–51. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.11.003>
- Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus. *Tourism Management*, 23(3), 233–244. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(01\)00078-4](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00078-4)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- Wehrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54–66. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(82\)90120-0](https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0)
- Yanti, D. E. S., & Chasanah, I. N. (2022). Desa wisata sebagai penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju Jombang berkarakter dan berdaya saing. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.38043/parta.v3i1.3594>

Zafi, M. F. A., & Triyasari, S. R. (2023). Strategi pengembangan BUMDes Pemuda Berkarya Sana Daja melalui pemetaan potensi desa. *AGRISCIENCE*, 4(1), 114–136.
<https://doi.org/10.21107/agriscience.v4i1.19703>